

SKRIPSI

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN,
STRUKTURISASI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MICHAEL SUTOWO

NIM : 125190180

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Michael Sutowo
NIM : 125190180
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Komisaris Independen,
Strukturisasi Kepemilikan Institusional, Dan
Leverage Terhadap Tax Avoidance
Alamat : [REDACTED]
HP : [REDACTED]

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juni 2024



Michael Sutowo

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MICHAEL SUTOWO
NIM : 125190180
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PAJAK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN,
STRUKTURISASI KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE
TERHADAP TAX AVOIDANCE

Jakarta, 10 Juni 2024



Pembimbing,
(Rini Tri Hastuti, S.E., Ak., M.Si)

Pengesahan

Nama : MICHAEL SUTOWO
NIM : 125190180
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen,
Strukturisasi Kepemilikan Institusional,
Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance
Title : Influence of Independent Commissioners,
Structuring Institutional Ownership, And
Leverage Against Tax Avoidance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 11 Juli 2024.

Tim Penguji:

1. HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)
2. RINI TRI HASTUTI, S.E., Ak., M.Si
3. MERRY SUSANTI, S.E, M.Si, AK, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
RINI TRI HASTUTI, S.E., Ak., M.Si
NIK/NIP: 10199030



Jakarta, 11-Juli-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, STRUKTURISASI
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP TAX
AVOIDANCE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *komisaris independen*, *kepemilikan institusional*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang memenuhi kriteria adalah 25 perusahaan. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *komisaris independen*, *kepemilikan institusional*, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya peneliti menggunakan seluruh sektor usaha yang terdaftar di BEI dan peneliti diharapkan memiliki waktu yang panjang dalam penelitian sehingga meneliti lebih banyak variabel independen.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage.*

ABSTRACT

This research aims to find out how independent commissioners, institutional ownership and leverage affect tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. The sample was selected using a purposive sampling method and data that met the criteria were 25 companies. The data processing technique uses multiple regression analysis assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) program. The results of this research show that independent commissioners, institutional ownership, and leverage have an insignificant influence on tax avoidance. The suggestion from this research is that researchers should use all business sectors listed on the IDX and researchers are expected to have a long time in research so as to examine more independent variables.

Keywords: *Tax Avoidance, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Leverage.*

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

MOTTO

Berjuanglah dengan totalitas dalam setiap hal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kekuatan dan penyertaan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, STRUKTURISASI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih terdapat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu penulis menyadari dengan adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rini Tri Hastuti, S.E., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, dukungan dan saran dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA(Aust.), CSRS. selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang memberikan dukungan, bantuan dan doa selama hidup penulis.
7. Rekan-rekan Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
8. Seluruh rekan satu bimbingan dengan Ibu Rini Tri Hastuti, S.E., Ak., M.Si. atas waktu, dukungan, bantuan, nasihat, informasi, kebersamaan, dan pengalaman suka duka yang telah dilalui bersama penulis selama penyusunan skripsi maupun selama masa studi di Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan adanya keterbatasan dari segi pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 12 Juni 2024

Penulis



Michael Sutowo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	6
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Grand Theory	9
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
B. Definisi Konseptual Variabel	10
1. <i>Tax Avoidance</i>	10
2. <i>Corporate Governance</i>	11
3. <i>Komisaris Independen</i>	11
4. <i>Kepemilikan Institusional</i>	12
5. <i>Leverage</i>	12
C. Kaitan Antar Variabel	13

D. Penelitian Terhadulu	16
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	17
1. Kerangka Pemikiran Penelitian	17
2. Hipotesis Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Desain Penelitian	19
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	20
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	21
D. Uji Asumsi Klasik	24
E. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Subjek Penelitian	32
B. Deskripsi Obyek Penelitian	38
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data	40
1. Uji Normalitas	40
2. Uji Multikolonieritas	41
3. Uji Autokorelasi	42
4. Uji Heteroskedastisitas	43
D. Hasil Analisis Data	44
1. Analisis Regresi Linear Berganda	44
2. Analisis Koefisien Determinasi	45
3. Uji F	46
4. Uji t	47
E. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Keterbatasan dan Saran	54
1. Keterbatasan	54
2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tabel Kriteria.....	21
Tabel 3.2 Ringkasan Operasional Variabel	23
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Perusahaan	29
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sektor Konsumsi	30
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	32
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	34
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	36
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	37
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Berganda	38
Tabel 4.9 Hasil Analisis <i>adjusted R Square</i>	39
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	40
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	40
Tabel 4.12 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Perusahaan F&B Sebelum dan Sesudah Outlier	54
Lampiran 2 Sampel Perusahaan F&B Periode 2018-2021	56
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Statistik Deskriptif	57
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Normalitas	57
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Multikolonieritas	58
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Autokorelasi	58
Lampiran 7 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Heteroskedastisitas	59
Lampiran 8 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Analisis Regresi	59
Lampiran 9 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Koefisien Determinasi.....	60
Lampiran 10 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji F	60
Lampiran 11 Hasil Output SPSS Versi 26 – Uji Paired Sample T-test	60
Lampiran 12 Hasil Turnitin	61
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak atau pengertian pajak dikutip dari situs resmi Departemen Umum Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, khusus kontribusi wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak secara sederhana adalah pemungutan yang dilakukan secara wajib oleh orang-orang atas nama negara. Fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk mencapai pembangunan dan menggaji PNS. Daripada memberikan kompensasi langsung kepada pembayar pajak, uang yang dikumpulkan melalui pajak akan dialokasikan untuk prioritas negara yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. P. J. A. Adriani (2020) berpendapat bahwa pajak bukanlah penerimaan yang dapat langsung dialokasikan dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum yang dikeluarkan dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pajak adalah suatu hal wajib penerimaan dari masyarakat kepada pemerintah. Semua pajak yang dibayarkan oleh warga negara termasuk dalam pendapatan pemerintah dari industri pajak. Dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk kepentingan umum. Pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Sumber daya nasional yang diperoleh melalui pajak digunakan untuk membiayai pembangunan pusat dan daerah, yang meliputi pembangunan fasilitas umum, pendanaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pajak dapat dipungut karena dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pajak menjadi beban usaha karena pelaku usaha adalah wajib pajak yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan berbagai cara, seperti melalui upaya peningkatan efisiensi pengeluaran termasuk beban pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga

perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2016). Untuk mengefisienkan beban pajak, banyak pelaku usaha atau perusahaan berusaha menghindari pajak. Upaya penghindaran pajak badan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan pemerintah untuk meminimalkan beban pajak. Penafsiran peraturan perpajakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran peraturan perpajakan yang tidak jelas juga dapat meminimalkan beban pajak. Upaya penghindaran pajak merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang saat ini menjadi fokus perhatian. Dengan kegiatan ini, negara akan mengalami kerugian yang cukup besar dari penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak dapat mempengaruhi kerugian dan default pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada berbagai jenis perpajakan di negara ini, antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah. Mengapa sebagai masyarakat harus memberi pajak? Apa manfaat yang sebenarnya dari pajak itu sendiri? Pajak merupakan sumber penghasilan dari negara yang utama. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintahan akan cukup terhambat untuk dilakukan. Pemanfaatan pajak berkisar dari biaya pegawai hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pajak membiayai pembangunan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi.

Uang pajak juga digunakan untuk keperluan keuangan guna mewujudkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara sejak lahir hingga meninggal mendapat manfaat dari fasilitas atau pelayanan pemerintah yang seluruhnya dibiayai oleh pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan juga untuk melunasi utang negara di luar negeri. Pajak juga digunakan untuk mendukung UMKM, baik dari segi pengembangan maupun permodalan.

Oleh karena itu, jelas bahwa peran penerimaan pajak suatu negara sangat besar dalam mendukung operasional pemerintahan dan pembangunan keuangan. Selain fungsi anggaran (fungsi pendapatan) tersebut di atas, pajak juga menjalankan fungsi mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang

mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih rendah.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya secara benar dan benar merupakan syarat mutlak terselenggaranya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat dikurangi semaksimal mungkin. Memahami pajak saja tidak cukup, kita harus meneliti dan memahami lebih dalam dari sudut pandang hukum perpajakan, permasalahan pokok perpajakan, keputusan perpajakan, sengketa perpajakan dan hak-hak wajib pajak. Selain pengetahuan pribadi, studi tentang pajak memberikan wawasan tambahan mengenai tujuan sebenarnya dari pajak tersebut, fungsinya, sanksi atas penipuan pajak, dan topik terkait perpajakan lainnya.

Pemerintah menerbitkan UU 7/2021 yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Oktober 2021 sebagai bagian dari aturan terbarunya. Dengan hadirnya beleid tersebut, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Peraturan Umum dan Tata Cara (KUP) yang tertuang dalam UU HPP tersebut telah resmi dilaksanakan.

Menurut (Ningsih & Mildawati, 2017), penggelapan pajak perusahaan memerlukan strategi untuk menghindari risiko deteksi sehingga undang-undang penghindaran pajak tidak dapat mendeteksi peraturan sehingga pemerintah (dalam hal ini CEO pajak) tidak dapat memaksakan undang-undang yang ditetapkan. sanksi terhadap perusahaan, padahal perilaku tersebut akan mengurangi penerimaan negara dari industri pajak. Pemimpin bisnis memiliki pemahaman yang jelas tentang keadaan bisnis, baik secara internal maupun eksternal, sehingga mengutamakan kepentingan pribadinya ketika mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis tanpa mempertimbangkan risiko terkait tindakan yang diambil. Sementara pemilik menjalankan bisnisnya, pemilik bisnis (pemegang saham) juga mengharapkan beban pajak yang rendah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Mengingat tren penghindaran pajak yang dilakukan Perseroan, maka tindakan penggelapan pajak yang dilakukan Perseroan perlu dilakukan pengawasan agar

kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan Perseroan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membangun tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu memantau kinerja manajemen, terutama dari perspektif perpajakan. Mekanisme tata kelola perusahaan meliputi kepemilikan institusional, rasio komisaris independen dan komite audit.

Menurut Winata (2014) Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pemangku kepentingan utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lainnya, regulator, lingkungan hidup, dan masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama tata kelola perusahaan menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab kantor, khususnya penerapan kebijakan dan mekanisme yang menjamin perilaku baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Hal penting lainnya adalah menurut Winata, 2014, tata kelola perusahaan berperan dalam pengambilan keputusan serta dalam memutuskan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tata kelola perusahaan yang baik harus konsisten dengan definisi pajak, khususnya bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Kegiatan penghindaran pajak perusahaan umumnya dianggap menguntungkan pemegang saham. Kualitas yang mendasari tata kelola perusahaan cukup rendah sehingga penyesuaian lebih lanjut dari kepentingan pemegang saham dan manajer terutama menghasilkan manajer mengurangi tingkat gangguan (Desai dan Dharmapala, 2004).

Menurut (Desai dan Dharmapala, 2004) Komisaris independen adalah anggota dewan pengawas yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan pengawas lainnya atau pemegang saham utama dan tidak mempunyai hubungan komersial atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi secara independen. Keberadaan komisaris independen akan mendorong

dan menciptakan lingkungan yang lebih independen, objektif, dan meningkatkan kesetaraan (fairness) yang merupakan salah satu prinsip dasar memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Wali Amanat yang independen mempunyai tanggung jawab utama untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong anggota dewan lainnya yang dapat menjalankan fungsi pengawasan, memberi nasihat secara efektif kepada direktur, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen mengetuai komite audit dan komite nominasi. Komite audit adalah komite yang bertugas melakukan audit terhadap organisasi. Komite audit dapat mewujudkan terciptanya tujuan perusahaan. Dan dapat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang dapat dilihat dari kualitas laba perusahaan. Menurut Pirzada et al. (2015) kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti, reksa dana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pensiun, institusi keuangan dan lainnya. Kepemilikan institusional menunjukkan adanya properti komparatif. Kepemilikan institusional suatu perusahaan mendorong pengawasan yang lebih besar agar kinerja manajemen lebih optimal.

Kontribusi jurnal saya adalah saya menambahkan variabel leverage sebagai variabel independen dan menggunakan sampel populasi perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama tahun 2020-2022. Perbedaannya dengan jurnal utama adalah bertambahnya variabel independen yaitu leverage dan periode penelitian yaitu 2020-2022.

A. Identifikasi Masalah

Banyak faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Faktor pertama yaitu *komisaris independen*. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Fitria Ningsih dan Titik Mildawati (2017), Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) (7), serta Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa *komisaris independen* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014) mendapatkan hasil

bahwa *komisaris independen* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah *kepemilikan institusional*. Penelitian yang dilakukan oleh James A. Chyz and Scott D. White (2014), serta Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014) menyatakan bahwa *kepemilikan institusional* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Gandy Wahyu Maulana Zulma (2016) menyatakan bahwa *kepemilikan institusional* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang ketiga adalah leverage. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015), serta Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Harry Barli (2018) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya kajian yang terkait dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi. Penelitian yang dilakukan ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022. Batasan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti pengaruh *komisaris independen*, *kepemilikan institusional* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Data yang diteliti bersifat kuantitatif dan sumber datanya menggunakan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah *komisaris independen* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *kepemilikan institusional* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai pengaruh *komisaris independen* terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk menjelaskan mengenai pengaruh *kepemilikan institusional* terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk menjelaskan mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan manfaat operasional. Manfaat bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan informasi mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang memengaruhi yang terdiri dari *komisaris independen*, *kepemilikan institusional* dan *leverage*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

Manfaat kedua yaitu manfaat operasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui keefektifan mekanisme Corporate Governance dalam meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, S. A., & Hariyanti, W. (Journal of Islamic Finance and Accounting, 2(1). *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*, 1-13.
- Ajija, Shochrul. R. et al. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*.
- Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2020-2040.
- Aulia, Ismiani & Mahpudin, Endang. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntabel Universitas Singaperbangsa*. Vol. 17, No. 2, h. 289–300.
- Astuti, T., P., dan Aryani, Y., A. (2016). Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesiayang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(03), 375-388.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 223-238.
- Desai, M. A., dan Dharmapala, D. 2004. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives". *Journal of Financial Economics*, Ed. April, hal 1-42
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 40-51.

- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2):249-260.
- Diantari, Putu Rista dan Ulupui, IGK Agung. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.1 Juli (2016): 702-732. ISSN: 2302-8556.
- Fenny Winata. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review* (Vol. 4, No.1, 2014)
- Fitri, A. W. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 20-30.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114-131.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), 82-91.
- Lawita, A. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2018).). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional

- Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), 117-124.
- Mulyana, Y., & Mulyati, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Viskal dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 160-172.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII*, No. 03 Hal.408-421.
- Ningsih, W. F., & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Corporate Governace terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember , 1-27.
- Pirzada, K., Mustapha, M.Z.B., and Wickramasinghe, D. 2015. Firm Performance, Institutional Ownership and Capital Structure: a Case of Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 170–176.
- Puspita, D., & Febriyanti, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen*, 19(1), 1-11.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 77-92.
- Pradipta, Dyah Hayu, & Supriyadi. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen

Terhadap Praktik Penghindaran Pajak". Simposium Akuntansi XVIII, Medan.

Santoso, Titus Bayu, dan Dul Muid. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 3.

Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 64-86.

Subagiastra, K., Arizona, P. E., & Kusuma, N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167-193.



Sunarsih, U., & Handayani, P. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185.

Tiala, F., Ratnawati, & Rokhman, T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return On Assets (ROA), dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(1), 9-20.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Michael Sutowo
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 September 2001
3. Alamat : 
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Telepon : 
8. E-mail : michael.125190180@stu.untar.ac.id
sutowomichael@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2019 – sekarang : S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara
2. 2018 – 2019 : PKBM Negeri 05 Jelambar
3. 2017 – 2018 : Sekolah Kemurnian II
4. 2016 – 2017 : SMA Kristen 1 BPK Penabur
5. 2013 – 2016 : SMP Kristen 2 BPK Penabur
6. 2007 – 2013 : SD Kristen 2 BPK Penabur

Jakarta, 3 Juni 2024



Michael Sutowo